

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BAGIAN
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2019

RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda mulai dilakukan setelah surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 050.13/601/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, kemudian Bagian Administrasi Perekonomian Setda membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 yang bertugas menyusun Rancangan

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Sebelum dilakukan asistensi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 berdasarkan surat undangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 005/968/35.07.202/2018. Kemudian tindak lanjut Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini, dengan melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2019 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. Pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 050.13/1835/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) sesuai hasil verifikasi. Rancangan Renja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Sedangkan Pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

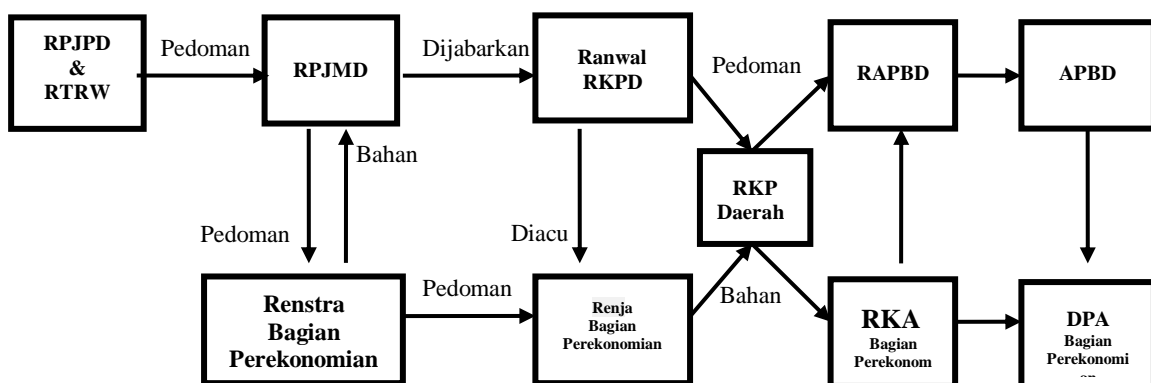
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian Setda menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Akhir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda Tahun 2016-2021, yang

tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, Sedangkan tujuannya penyusunan rencana kerja ini adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Perekonomian Setda;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda;

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Pada Tahun 2017 Bagian Administrasi melaksanakan 11 program dan 29 kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian kinerja/ program kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017 dapat tercapai 100%. Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki sasaran strategis pertama yaitu Monitoring dan Evaluasi pelaku usaha mikro, dengan indikator kinerja Kelancaran fasilitasi usaha mikro dengan target 2 pelaporan dan realisasi 2 pelaporan. Sasaran strategis kedua yaitu Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan system distribusi tertutup LPG tertentu dan Pengawasan harga eceran tertinggi LPG Tertentu dengan indikator Kelancaran distribusi LPG Tertentu Tabung 3 Kg yaitu target 2 pelaporan dan realisasi 2 pelaporan. Sasaran strategis ketiga yaitu Monitoring dan Evaluasi distribusi Raskin dengan indikator kinerja Kelancaran Distribusi Raskin dengan target 2 pelaporan dan realisasi 2 pelaporan. Dari target dan realisasi masing-masing sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa tercapai 100% sehingga dapat dikatakan berhasil.

Pencapaian target 100% adalah terpenuhinya pelaporan Monitoring dan Evaluasi pelaku usaha mikro, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan system distribusi tertutup LPG tertentu dan Pengawasan harga eceran tertinggi LPG Tertentu dan Monitoring dan Evaluasi distribusi Raskin (yang pada tahun 2017 istilah Raskin diubah menjadi Rastra/ Beras Untuk Keluarga Sejahtera), yang dilaksanakan periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu semester I dan semester II.

Pada Tahun 2016 masih terdapat beberapa target capaian kinerja program dalam Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda yang masih belum sesuai dengan standar satuan yang telah dilakukan evaluasi di Tahun 2017.

Tahun 2018 Bagian Administrasi Perekonomian Setda melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program kegiatan Tahun 2018 diperkirakan dapat di proyeksikan 100%. Capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Semester pertama tahun 2018 rata-rata sebesar 66,67%.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Perekonomian meliputi :

1. Pelaporan monitoring dan evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro Kreatif,
2. Pelaporan monitoring implementasi distribusi tertutup LPG Tabung 3 kg di Kabupaten Malang,
3. Serta pelaporan evaluasi kinerja BUMD.

Pelaporan tersebut masing masing terdiri dari 2 laporan semester 1 dan 2, dengan jumlah pelaporan 6 laporan untuk pelaporan evaluasi kinerja BUMD pada triwulan 1 merupakan evaluasi atas kinerja BUMD pada tahun sebelumnya, dan triwulan 3 adalah evaluasi atas kinerja BUMD pada semester 1 tahun berjalan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda dan pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

12
Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s.d 2021(akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2018 (Tahun Berjalan)		Keteran gan
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
	Urusan: Perencanaan										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	600 buah	150 surat	120 surat	120 surat	100	120 buah		120 buah*	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak	360 orang	6 orang	72 OB	72 OB	100	72 OB		72 OB*	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan dan sarana kebersihan kantor	60 OB	2 ruangan	12 OB	12 OB	100	12 OB		12 OB*	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor	60 Jenis	12 bulan	55 Jenis	55 Jenis	100	60 Jenis		60 Jenis*	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	12 bulan	7 Jenis	7 Jenis	100	6 jenis		6 jenis*	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik	6 jenis	12 bulan	8 Jenis	8 Jenis	100	6 jenis		6 jenis*	

7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	3 sub bag	2 Jenis	2 Jenis	100	2 jenis		2 jenis*	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	911 HOK	176 HOK	143 HOK	143 HOK	100	192 HOK		192 HOK*	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah	850 HOK	150 perjalanan	50 HOK	50 HOK	100	200 HOK		200 HOK*	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi	967 HOK	300 perjalanan	167 HOK	167 HOK	100	200 HOK		200 HOK*	
11	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah bahan Logistic kantor yang dibeli	243 HOK	-	243 HOK	63 HOK	100	243 HOK		75 HOK	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	2 ruangan	3 jenis	3 jenis	100	5 jenis		5 jenis*	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	2 ruangan	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		3 jenis*	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 & 2 yang dipelihara rutin/ berkala	28 unit	6 unit	4 unit	4 unit	100	6 unit		6 unit	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		3 jenis	

5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/pelihara	3 jenis	17 unit	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		3 jenis*	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait	-	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	77 stel	16 personil	13 stel	13 stel	100	16 stel		16 stel*	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah penyediaan pakaian dinas	77 stel	-	13 stel	13 stel	100	16 stel		16 stel*	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	94 orang	17 orang	13 orang	13 orang	100	16 orang		16 orang*	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	5 Buku	1 laporan	1 Buku	1 Buku	100	1 buku		1 buku*	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	10 Buku	2 laporan	2 Buku	2 Buku	100	2 buku		2 buku*	
I	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Prosentase jumlah pelaporan Keikutsertaan dalam pameran berskala lokal	-	50%	50%	50%	100%	-	-	-	

1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan pelaksanaan, perencanaan, koordinasi & pengembangan usaha kecil menengah	-	0	2 Laporan	2 Laporan	100	-	-	-	
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan hasil evaluasi dan monitoring pelaku usaha kecil dan mikro	2 laporan	1 Kegiatan	2 laporan	2 laporan	100	-	-	-	
II	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase promosi potensi ekonomi daerah	-	50%	50%	100	-	-	-	-	
1	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	1 data potensi	1 data potensi	1 data potensi	1 data potensi	100	-	-	-	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-	
III	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	50%	50%	100	100	-	-	-	
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	2 Laporan	33 kecamatan	2 laporan	2 laporan	100	-	-	-	
IV	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	50%	50%	100	100	-	-	-	
1	Peningkatan Manajemen Investasi daerah	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 laporan	12 kali	6 laporan	6 laporan	100	-	-	-	
V	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	Prosentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	50%	50%	50%	100	-	-	-	
1	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah pelaporan capaian info ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	1 laporan	1 kali	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-	
VI	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase pelaporan pendistribusian Raskin	-	50%	50%	100%	100	-	-	-	

1	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	-	12 kali	2 laporan	2 laporan	100	-	-	-	
VII	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100%	-	-	-	-	100	100	100	
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	8 laporan	-	-	-	-	2 laporan		2 laporan*	
VIII	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	8 laporan	-	-	-	-	100	100	100	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaporan Monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	8 laporan	-	-	-	-	2 laporan		2 laporan*	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan Monitoring dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan	8 laporan	-	-	-	-	2 Laporan		2 laporan*	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	8 laporan	-	-	-	-	2 laporan		2 laporan*	

Keterangan tabel 2.1

**) Tidak dapat di akumulasikan karena adanya perbedaan baik nama target kinerjanya maupun volume/ besar kinerjanya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda adalah penyusunan bahan pelaporan distribusi barang bersubsidi. Dalam penyusunan bahan pelaporan barang bersubsidi, maka telah dihasilkan dokumen pelaporan yaitu:

1. Laporan Distribusi Raskin Tahun 2016 – 2017;
2. Laporan Distribusi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 – 2017;
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro 2016 – 2017.

Adapun Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah di tahun 2018 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang perekonomian yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian yang terdiri dari Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	tepat waktu dan akuntabel											
19.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	
20.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	-	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
6.	Persentase jumlah pelaporan kikutsertaan dalam pameran berskala lokal			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
21.	Jumlah pelaporan pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	Merupakan kegiatan baru sebagai akibat terbentuknya sub- bagian koperasi dan UKM
22.	Jumlah pelaporan/evaluasi fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	
7.	Persentase promosi potensi ekonomi daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
23.	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	-	-	1 data potensi	-	-	-	1 data potensi	-	-	-	
24.	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
8.	Persentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
25.	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	
9.	Persentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
26.	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	6 laporan	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-
10.	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	perundang-undangan di bidang cukai											
27.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
11.	Persentase materi yang disampaikan dalam rangka peningkatan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
29.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
13.	Prosentase Pelaporan pendistribusian Raskin			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
30.	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	
14.	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
31.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
15.	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
32.	Pelaporan monitoring Koperasi dan Usaha Mikro				2 laporan	2 laporan	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
33.	Pelaporan monitoring Perindustrian dan Perdagangan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	Pelaporan monitoring Pemanfaatan Sarana Perekonomian & BUMD				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bagian Administrasi Perekonomian bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun lebih untuk menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan penyajian pelaporan dan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau stakeholder terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan, maka koordinasi dengan PD dan stakeholder terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yang akan dan diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi” pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dokumen perencanaan Bagian Administrasi Perekonomian ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan

berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dengan hasil bahwa beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, dan serta Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian antara lain monitoring koperasi dan usaha mikro, monitoring perindustrian dan perdagangan serta monitoring pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

25
Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	160.334.200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	453.704.358	Jumlah Anggaran Mengalami penurunan
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	120 surat	5.800.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	120 surat	225.000	-
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	72 OB	39.739.000	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	72 OB	239.748.000	Digunakan untuk honorarium PPTK
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	12 OB	4.531.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	12 OB	6.479.949	Jumlah anggaran mengalami penurunan disesuaikan dengan kebutuhan
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	60 Jenis	14.401.000	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	60 eis	26.973.643	-
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 Jenis	2.774.200	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	8.808.600	-
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	6 Jenis	1.782.000	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	6 jenis	1.599.166	-
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2 Jenis	1.741.000	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	2.400.000	-
	8. Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kab. Malang	Jumlah bahan Logistic kantor yang dibeli	243 HOK	4.400.000	8. Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kab. Malang	Jumlah bahan logistic yang dibeli	243 HOK	4.391.000	-
	9. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	192 HOK	3.882.000	9. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	192 HOK	8.820.000	-
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	200 HOK	48.884.000	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	200 hok	79.704.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	200 HOK	32.334.000	1.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	200 hok	74.555.000	Jumlah anggaran disesuaikan acuan realisasi th 2016
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	36.727.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	28.822.044	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pemeliharaan barang
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 Jenis	15.209.000	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 jenis	2.854.642	-
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	2.790.000	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	500.000	-
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 Jenis	3.741.000	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 jenis	720.000	-
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	6 Unit	10.803.000	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	6 unit	16.716.075	Terjadi pengurangan kendaraan R2
	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 Jenis	4.184.000	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 jenis	8.031.327	-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	100%	11.723.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	100%	11.294.598	Kegiatan diajukan guna memenuhi kebutuhan pakaian pegawai
	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	5.815.000	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	7.794.598	Pengadaan seragam putih hitam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	16 setel	5.908.000	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	16 setel	3.500.000	Pengadaan seragam olah raga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	85.866.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100.000.000	Untuk mengikuti peningkatan kapasitas pegawai
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	16 orang	85.866.000	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	16 orang	100.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	14.498.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	9.267.753	Untuk lembur penyusunan
	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 Buku	7.489.000	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 buku	5.619.216	Untuk lembur penyusunan prognosa keuangan
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	1. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2 buku	7.009.000	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	2. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2buku	3.648.537	Untuk lembur penyusunan CALK dan LKj
	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	100%	150.000.000	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	100%	150.000.000	Sesuai Permenkeu no.28 th.2016
	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	2 laporan	150.000.000	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	2 laporan	150.000.000	
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Kab. Malang	Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100%	1.018.542.000	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Kab. Malang	Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100 %	729.403.000	Sesuaian nomenklatur program/kegiatan sesuai reвью Renstra

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 laporan	380.968.000	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 laporan	241.990.333	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 laporan	380.980.000	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 laporan	245.639.000	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 laporan	256.594.000	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 laporan	241.774.000	
JUMLAH					1.477.624.000	JUMLAH					1.473.224.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah penyiapan bahan pelaporan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak menghimpun langsung usulan Program / Kegiatan Masyarakat, dan lebih sebagai *suporting staff* di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SETDA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS baik laki-laki maupun perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati ke 2 (dua) meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui fasilitasi pelayanan Administrasi Perekonomian.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.
6. Program Administrasi Bidang Perekonomian.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
19. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
22. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai;
23. Monitoring dan Evaluasi sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro;
24. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
25. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

1	Kode	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05		Fungsi Penunjang urusan Fungsi Lainnya								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	100%	155.868.000	PAD		100%	252.912.614	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	Kab. Malang	120 buah	5.800.000	PAD		120 buah	1.054.152	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honorarium dalam satu tahun	Kab. Malang	72 OB	39.739.000	PAD		72 OB	65.604.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Kab. Malang	12 OB	4.531.000	PAD		12 OB	5.830.000	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kab. Malang	60 jenis	14.401.000	PAD		60 jenis	26.152.486	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Kab. Malang	6 jenis	2.774.000	PAD		6 jenis	3.221.020	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	Kab. Malang	6 jenis	1.782.000	PAD		6 jenis	3.235.661	

		Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Kab. Malang	2 jenis	1.741.000	PAD		2 jenis	3.162.456	
	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab. Malang	192 HOK	3.882.000	PAD		192 HOK	5.234.158	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	Kab. Malang	200 HOK	48.884.000	PAD		200 HOK	80.700.950	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	Kab. Malang	200 HOK	32.334.000	PAD		200 hok	58.717.731	
	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Malang	234 HOK	4.400.000	192 HOK		234 HOK	4.480.000	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik	Kab. Malang	100%	36.727.000	PAD		100%	60.553.361	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	4.184.000	PAD		3 jenis	7.598.679	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/ kantor yang tersedia	Kab. Malang	5 jenis	15.209.000	PAD		5 jenis	25.107.500	

		Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	6 unit	10.803.000	PAD		6 unit	19.618.940	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor	Kab. Malang	3 jenis	4.184.000	PAD		3 jenis	7.598.679	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	2.190.000	PAD		3 jenis	5.065.786	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparaturnya terkait penggunaan pakaian dinas	Kab. Malang	100%	14.400.000	PAD		100%	14.400.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	5.815.000	PAD		16 setel	9.600.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	5.908.000	PAD		16 setel	4.800.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparaturnya	Kab. Malang	100%	85.866.000	PAD		100%	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparaturnya yang diikuti	Kab. Malang	16 orang	85.866.000	PAD		16 orang	15.000.000	Mendukung program Responsif gender

		Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kab. Malang	100%	14.498.000	PAD		100%	9.267.753	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	Kab. Malang	1 buku	7.489.000	PAD		1 buku	5.619.216	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Kab. Malang	2 buku	7.009.000	DAU		2 buku	3.648.537	
	Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	100%	150.000.000	DBHCHT		100%	150.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	2 laporan	150.000.000	DBHCHT		2 laporan	150.000.000	
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	Kab. Malang	25 %	1.018.542.000	PAD		25 %	1.768.832.445	

		Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 laporan	380.968.000	PAD		2 laporan	673.663.749	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 laporan	380.980.000	PAD		2 laporan	683.683.936	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	2 laporan	256.594.000	PAD		2 laporan	411.484.760	
JUMLAH					1.473.224.000		JUMLAH	2.270.966.173		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG

Rancangan Rencana kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang di tahun 2019 melaksanakan 7 Program dengan 24 kegiatan. Adapun Pendanaan Program dan kegiatan tersebut bersumber dari PAD dan 1 Program yang di ambil dana dari DBHCHT. Program/ Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang dan sumber dananya dapat dijelaskan pada tabel Berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2019
Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

1	Kode	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	4	5	6	7	8
4.05	Fungsi penunjang urusan fungsi lainnya						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	100%	155.868.000	PAD	
	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah Registrasi Surat masuk dan Keluar	Kab. Malang	120 buah	5.800.000	PAD	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honorarium dalam satu tahun	Kab. Malang	72 OB	39.739.000	PAD	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Kab. Malang	12 OB	4.531.000	PAD	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kab. Malang	60 jenis	14.401.000	PAD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Kab. Malang	6 jenis	2.774.000	PAD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	Kab. Malang	6 jenis	1.782.000	PAD	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Kab. Malang	2 jenis	1.741.000	PAD	

		Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	4	5	6	7	8
	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab. Malang	192 HOK	3.882.000	PAD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	Kab. Malang	200 HOK	48.884.000	PAD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	Kab. Malang	200 HOK	32.334.000	PAD	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik	Kab. Malang	100%	36.727.000	PAD	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	5 jenis	15.209.000	PAD	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/ kantor yang tersedia	Kab. Malang	3 jenis	4.184.000	PAD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	6 unit	10.803.000	PAD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor	Kab. Malang	3 jenis	2.790.000	PAD	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	3.741.000	PAD	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	Kab. Malang	100%	11.723.000	PAD	

		Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	5.815.000	PAD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	5.908.000	PAD	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	Kab. Malang	100%	85.866.000	PAD	
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	Kab. Malang	16 orang	85.866.000	PAD	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kab. Malang	100%	14.498.000	PAD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	Kab. Malang	1 buku	7.489.000	PAD	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Kab. Malang	2 buku	7.009.000	DAU	
	Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	100%	150.000.000	DBHCHT	
	Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	2 laporan	150.000.000	DBHCHT	

		Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	4	5	6	7	8
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	Kab. Malang	25 %	1.018.542.000	PAD	
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 laporan	380.968.000	PAD	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 laporan	380.980.000	PAD	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	2 laporan	256.594.000	PAD	
Jumlah					1.473.224.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2018 Rancangan Rencana Kerja ini terdapat 7 program dan 24 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2019 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA